

Sumbangan Pemikiran Tokoh Islam dalam Perkembangan Ilmu Politik dan Pemerintahan

Muhammad Afdhal Arrazak¹, Siti Fatimah², Azmi Fitriasia³

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang

e-mail: muhammadafdhalarrazak@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan signifikan sejatinya tidak terlepas dari peran para ilmuwan dan cendekiawan yang menyumbangkan pemikirannya dalam berbagai bidang ilmu termasuk bidang politik dan pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana sumbangan pemikiran tokoh Islam dalam perkembangan ilmu politik dan pemerintahan. Metode penelitian pada artikel ini adalah library research atau studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur tertulis baik itu buku maupun artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh dan ilmuwan Islam memiliki kontribusi berupa sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan. Pertama yaitu Al Farabi yang mengemukakan konsep negara utama/ideal (*Al Madina Al Fadila*). Kedua, Al Mawardi yang menggambarkan konsep khilafah/kepemimpinan dan tata pemerintahan dalam Islam (*Al-Ahkam al-Sultaniyah*). Ketiga, Imam Al Ghazali yang mengemukakan pemikirannya tentang pentingnya nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Keempat, Ibnu Khaldun yang menggambarkan konsep Ashabiyyah (solidaritas sosial) yang dianggap sebagai hal utama dalam pembentukan dan kehancuran dinasti atau negara.

Kata kunci: *Pemikiran Tokoh Islam, Ilmu Politik, Pemerintahan*

Abstract

The very rapid and significant development of science cannot be separated from the role of scientists and scholars who contribute their thoughts in various fields of science, including politics and government. This article aims to describe the contribution of Islamic figures' thoughts to the development of political science and government. The research method in this article is library research or literature study, by collecting data from various sources of written literature, both books and journal articles. The research results show that Islamic figures and scientists have contributed in the form of ideas in the fields of political science and government. The first is Al Farabi who put forward the concept of the main/ideal state (*Al Madina Al Fadila*). Second, Al Mawardi who describes the concept of caliphate/leadership and governance in Islam (*Al-Ahkam al-Sultaniyah*). Third, Imam Al Ghazali expressed his thoughts on the importance of Islamic religious values in political life and government. Fourth, Ibn Khaldun described the concept of Ashabiyyah (social solidarity) which was considered the main thing in the formation and destruction of dynasties or countries.

Keywords : *Thoughts of Islamic Figures, Political Science, Government*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam menjalani kehidupan tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan hidup. Tantangan dan permasalahan hidup itu sendiri menjadikan manusia dituntut untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar mampu mengatasi berbagai persoalan hidup yang semakin kompleks dan memudahkan sebagai aktivitas hidup manusia. Berbagai tantangan dan permasalahan hidup yang dihadapi manusia, contohnya seperti kebutuhan untuk bertahan hidup, adaptasi dengan lingkungan hingga penyelesaian konflik sosial bermasyarakat akan terus mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan

berakar dari kompleksnya permasalahan dan kebutuhan manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang bermasyarakat (Muktapa, 2021).

Perkembangan ilmu pengetahuan telah merambah pada semua aspek kehidupan manusia salah satunya juga termasuk dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan. Perkembangan ilmu politik dan pemerintahan ini sebenarnya memainkan peran vital dalam kehidupan masyarakat, apalagi manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan hidup bersama dan saling membutuhkan satu sama lain. Ilmu politik dan pemerintahan menjadi disiplin yang mempelajari kekuasaan, struktur, dan proses pemerintahan, dimana ilmu politik ini tentunya membantu masyarakat memahami dinamika politik karena politik akan mempengaruhi kehidupan semua orang (Bahram et al., 2023 ; Mulia, 2024)

Ilmu politik sangat berperan dalam menciptakan kebijakan publik, yang tentunya akan berkaitan langsung dengan kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Proses pembuatan kebijakan yang dipahami oleh masyarakat, akan mendorong masyarakat untuk dapat menilai efektivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dan mendorong perbaikan yang diperlukan. Selain itu, politik yang stabil yang akan menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Keadaan politik dan pemerintahan yang stabil akan lebih membentuk iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Malik et al., 2023)

Perkembangan ilmu politik dan pemerintahan yang semakin kompleks dari masa ke masa tentunya tidak terlepas dari peranan banyak tokoh dan para ilmuwan yang mengembangkan dan mengemukakan berbagai teori dalam menyempurnakan keilmuan. Tokoh-tokoh pemikir Islam pun turut dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan konsepnya dalam perkembangan ilmu politik dan pemerintahan. Tokoh islam yang dikenal dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang politik dan pemerintahan seperti Al Farabi dengan konsep negara utama yang dikemukakannya, dimana menggambarkan negara utama yang ideal itu memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana (Manu & Soraya, 2021). Selain itu juga ada Al-Mawardi mengemukakan kerangka politik mengenai apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan, termasuk ketentuan dasar dalam mengangkat seorang pemimpin dan tugas-tugasnya (sahidin, 2021). Pemikiran tokoh islam tersebut tentunya telah memberikan landasan konseptual yang kaya dalam perkembangan ilmu politik dan pemerintahan.

Melihat kompleksnya permasalahan sosial dan pentingnya ilmu politik dan pemerintahan dalam kehidupan manusia menjadikan perkembangan ilmu politik dan pemerintahan sangat dibutuhkan. Maka dari itu dalam tulisan ini akan membahas mengenai tokoh Islam dan sumbangsih pemikirannya dalam perkembangan ilmu politik dan pemerintahan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan. Pendekatan penelitian studi kepustakaan ini menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai data utama untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengembangkan argumen. Sumber-sumber dalam penelitian studi kepustakaan ini seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, laporan, dan bahan tertulis lainnya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi yang telah tersedia, guna untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu. Prosesnya meliputi identifikasi, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari literatur yang ada. Metode ini pada dasarnya sering digunakan dalam penelitian sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Al Farabi tentang konsep negara utama/ideal (Al-Madina Al-Fadila)

Al-Farabi atau yang memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibn Tarkas Ibn Auzalagh merupakan cendekiawan yang dikenal sebagai "Filosof Kedua" setelah Aristoteles, beliau adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan cendekiawan Muslim yang lahir sekitar tahun 870 M di Utrar Farab. Al-Farabi meninggal pada tahun 950 M di Damaskus (Iqbal & Nasution dalam Mutiani, 2020). Al Farabi ini mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk logika, matematika, astronomi, musik, dan ilmu politik. Al-Farabi terkenal dengan keahliannya dalam mengintegrasikan filsafat Yunani kuno

dengan ajaran Islam, serta karyanya yang mendalam dalam bidang teori politik, terutama dalam konsep negara utama/ideal yang disebut *Al-Madina al-Fadila*. Ia juga mengembangkan pemikiran tentang ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu fisika, ketuhanan, fikih dan ilmu kalam yang mana ini tentunya sangat memberikan pengaruh besar pada pemikir-pemikir Islam dan Barat dan warisannya tetap dihormati dalam tradisi intelektual Islam dan Barat (Mutiani, 2020).

Al-Madina al-Fadila merupakan sebuah karya terkenal dari Al-Farabi yang membahas konsep negara utama/ideal. Dalam karyanya ini Al Farabi menggambarkan bagaimana seharusnya atau idealnya masyarakat itu diatur dalam mencapai kebahagiaan yang menyeluruh. Selain itu Al-Farabi juga menggambarkan bahwa negara yang utama/ideal yaitu negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan berbudi pekerti tinggi. Pemimpin tersebut harus mampu bersikap adil dan bijaksana dalam mengarahkan rakyat menuju kebahagiaan serta pemimpin harus menjunjung tinggi pada prinsip-prinsip moral yang luhur. Fungsi utama pemerintahan dalam pemikiran Al-Farabi ini menekankan bahwa pemerintahan berfungsi menciptakan keadaan yang memungkinkan setiap individu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melalui keadilan dan kepemimpinan yang bijaksana (Muttaqin, 2022).

Al-Farabi menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus berperan aktif untuk mencapai kebahagiaan yang menyeluruh (Mutiani, 2020). Konsep **al-Madinah al-Fadhilah** menekankan kebahagiaan sosial sebagai tujuan utama, di mana masyarakat hidup harmonis dengan menjalankan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Kebahagiaan ini dicapai melalui kerjasama dan peran setiap individu dalam memenuhi fungsi mereka demi kebaikan bersama (Pramono & Maulidia, 2022)

Pemikiran Al Mawardi tentang Konsep Khilafah

Al-Mawardi atau yang memiliki nama lengkap Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri lahir di Basrah, Irak, adalah seorang ulama, cendekiawan, dan ahli fikih terkenal yang bermazhab syafi'i. Ia meninggal pada tahun 1058 M di Baghdad, dan kontribusinya tetap dihargai dalam studi politik dan hukum Islam hingga saat ini. Al Mawardi dikenal terutama karena karya-karyanya dalam bidang ilmu politik dan fiqh, terutama buku *Al-Ahkam al-Sultaniyah* yang membahas tentang tata pemerintahan dalam Islam. Dalam pemikirannya, Al-Mawardi menggambarkan teori mengenai sistem kepemimpinan atau khilafah, pemerintahan, serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam suatu negara Islam. Selain itu, Al-Mawardi juga menulis banyak karya mengenai hukum Islam dan etika politik, yang banyak memengaruhi sistem pemerintahan di dunia Islam (Sahidin, 2021).

Dalam bukunya *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, Al-Mawardi mengemukakan pandangannya mengenai kedudukan dan tugas khalifah (pemimpin) dalam sistem pemerintahan Islam. Al-Mawardi menggambarkan bahwasanya manusia sebagai khalifah/pemimpin dimuka bumi ini memiliki peran sentral sebagai pemimpin umat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan duniawi dan keagamaan rakyat. Sebagai seorang Khalifah atau pemimpin, manusia tidak hanya berperan dalam mengatur urusan duniawi politik dan sosial saja, akan tetapi juga harus menjaga agama dan moralitas masyarakat (sahidin, 2021). Pemimpin harus memastikan kekayaan negara dikelola dengan baik, hukum ditegakkan dengan adil serta menjaga keamanan negara sehingga dapat membentuk kestabilan politik.

Akhlak yang mulia haruslah dimiliki oleh manusia sebagai seorang pemimpin atau khalifah dimuka bumi juga kemampuan intelektual yang tinggi, serta pengalaman dalam urusan pemerintahan. Pengangkatan khalifah juga dijelaskan Al Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, dimana dalam menentukan dan mengangkat seorang pemimpin haruslah memiliki keahlian dalam menjalankan tugas kekhalifahan dan didasarkan pada ijma' ulama. Khalifah yang terpilih harus memenuhi beberapa syarat, seperti kemampuan memimpin, sikap yang adil, serta kemampuan dalam menjaga agama. Al-Mawardi juga menekankan bahwa khalifah harus adil, menjaga kepentingan rakyat, dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Dalam pandangan Al-Mawardi, kepemimpinan dalam Islam bukan hanya soal memegang kekuasaan, tetapi juga soal amanah dan tanggung jawab besar terhadap umat (Sahidin, 2021).

Pemikiran Imam Al Ghazali dalam Bidang Politik

Imam Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan, filsuf, teolog, dan ahli hukum Islam yang sangat berpengaruh. Ia dikenal dengan karya-karyanya yang menggabungkan pemikiran filosofis dengan ajaran agama Islam, serta kontribusinya dalam bidang tasawuf, fiqh, dan teologi. Dalam pemikirannya dibidang politik, Al-Ghazali mengemukakan pentingnya hubungan antara agama, moral dan kekuasaan, dengan artian bahwa pemimpin harus memiliki moralitas yang tinggi, adil, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Ia percaya bahwasanya dalam mencapai keadilan, pemimpin harus menjaga keharmonisan sosial dan menerapkan hukum Islam (Yasmin et al., 2024)

Fokus pemikiran politik Imam Al Ghazali adalah pada hubungan antara agama, moralitas, dan kekuasaan dalam kehidupan politik. Ia menekankan bahwa dalam menjaga kesejahteraan umat pemimpin harus memiliki tanggung jawab dan kualitas moral yang tinggi, baik secara duniawi maupun spiritual. Menjadi pemimpin yang ideal harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, mengutamakan keadilan, dan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa kekuasaan politik tidak terpisah dari ajaran agama, karena negara ideal dalam Islam adalah yang mengintegrasikan hukum-hukum agama dengan kebijakan pemerintahan (Muhammad, 2023)

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Konsep Ashabiyyah

Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, filsuf, sosiolog, dan ekonom Muslim yang dikenal sebagai pelopor ilmu sosial. Karya terkenalnya, *Muqaddimah* (Prolegomena), mengemukakan analisis mendalam tentang sejarah, peradaban, dan dinamika sosial-politik. Dalam pemikirannya dibidang politik, Ibnu Khaldun mengembangkan konsep *ashabiyyah* (solidaritas sosial), yang ia anggap sebagai faktor utama dalam pembentukan dan kehancuran negara. Ia berpandangan bahwa kekuatan suatu dinasti atau negara tergantung pada kekuatan internal yang bersumber dari solidaritas sosial antara pemimpin dan rakyat (Damanik, 2021).

Teori *ashabiyyah* adalah konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam karyanya *Muqaddimah*, yang merujuk pada solidaritas sosial atau ikatan kelompok yang kuat dalam masyarakat. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keberhasilan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada *ashabiyyah*, atau solidaritas sosial di antara anggotanya. *Ashabiyyah* yang kuat baik dalam bentuk ikatan suku, keluarga, atau kelompok sosial merupakan fondasi yang membuat sebuah kelompok mampu mengalahkan kelompok lain dan menguasai kekuasaan. Menurutnya, pada awalnya, kelompok yang memiliki *asabiyyah* yang kuat akan bangkit dan membentuk pemerintahan yang stabil dan sukses (Widayani, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peranan dan kontribusi pemikiran para ilmuwan termasuk ilmuwan Islam. Dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan terdapat banyak tokoh yang mengemukakan pemikirannya. Pada tulisan ini dijelaskan mengenai pemikiran Al Farabi tentang konsep negara utama/ideal yang menggambarkan sebuah negara ideal yang bertujuan mencapai kebahagiaan sosial melalui keadilan, moralitas, dan kerjasama. Pemikiran Al Mawardi tentang khilafah/kepemimpinan yang menekankan pentingnya **khilafah/pemimpin** dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Pemikiran Imam Al Ghazali tentang nilai agama dan moral sangat penting dalam politik karena agama menjadi landasan moral yang menjaga keadilan dan kestabilan pemerintahan. Terakhir pemikiran Ibnu Khaldun tentang pentingnya *ashabiyyah* (solidaritas sosial) dalam pembentukan dan kehancuran dinasti atau negara.

DAFTAR PUSTAKA

Bahram, M., Muhana, A. F., Asm, S. N., & Muhaimin, M. (2023). DINAMIKA TRANSFORMASI POLITIK DI ERA GLOBALISASI: KAJIAN KRITIS DALAM LITERATUR ILMU POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(3), 101-110.

- Damanik, A. (2021). Pembentukan Teori Sosiologi Politik Oleh Ibnu Khaldun. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 7(1), 66-79.
- Malik, A., Prabowo, D., Priadi, D., & Kamil, E. F. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP STABILITAS EKONOMI NASIONAL. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(1), 108-114.
- Manu, A. K., & Soraya, Z. (2021). Negeri utama Dan perannya dalam meraih kebahagiaan perspektif al-farabi. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 7(1), 65-86.
- Muhammad, R. (2023). Relevansi Pemikiran Politik Al-Ghazali Pada Sistem Politik Kontemporer. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, 2(2), 147-156.
- Muktapa, M. I. (2021). Implikasi filsafat ilmu dan etika keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 3(2), 20-29.
- Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(6), 515-532.
- Mutiani, T. (2020). Negara Utama Menurut Al-Farabi (konsep dan relevansinya dalam kehidupan bernegara masa kini). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 6(2), 29-42.
- Muttaqin, J. (2022). Al-Farabi: Politik sebagai Jalan Kebahagiaan. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 129-144.
- Pramono, M. F., & Maulidia, R. (2022). Konsep Negara Utama dan Hubungannya dengan Kebahagiaan Menurut Al-Farabi. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(4), 1276-1291.
- Sahidin, A. (2021). Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 72-81.
- Widayani, H. (2022). Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis terhadap Teori 'ashabiyyah). *MANTHIQ: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*, 6(1), 41-51.
- Yasmin, N. K., Tsaqif, M. D., & Lubis, A. C. (2024). SEJARAH SERTA SETTINGAN SOSIAL DAN POLITIK AL-GHAZALI, IBN TAIMIYAH & IBN KHALDUN. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(7).